

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang rawan sekali terhadap kejadian bencana. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor – faktor risiko bencana yang berada di Indonesia. Berdasarkan data dari BNPB tahun 2017, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung merupakan mayoritas bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dimana banjir menempati urutan pertama sebagai bencana dengan kejadian yang paling sering terjadi. Kejadian bencana banjir terbesar yang pernah terjadi di Indonesia ialah banjir bandang secara beruntun yang terjadi pada tahun 2007 di Sulawesi Selatan.

Faktor yang menjadi pemicu risiko kejadian banjir di Indonesia secara geografis ialah 30% dari 5.000 sungai besar maupun kecil berada di wilayah padat penduduk sehingga dapat menjadi ancaman bencana banjir dan banjir bandang pada saat musim hujan (Depkes RI, 2007). Faktor lain yang menjadi pemicu kejadian banjir di negara Indonesia adalah kegiatan manusia baik berupa pembangunan infrastruktur yang masih belum memperhatikan kaidah dalam konservasi lingkungan serta pemanfaatan tata ruang yang melebihi kapasitas kemampuan dan daya dukungnya (Rosyidi, 2013).

Pada buku Risiko Bencana Indonesia (RBI) tahun 2016 dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan keterpaparan risiko banjir tertinggi di Indonesia. Berdasarkan matriks jumlah paparan risiko bencana banjir di wilayah provinsi (BNPB, 2016), Jawa Timur memiliki jumlah jiwa terbanyak se Indonesia yang terpapar risiko bencana banjir yaitu 33.327.643, dengan nilai aset fisik terpapar sebanyak Rp. 23.622.748, aset ekonomi terpapar sebesar Rp. 31.891.405 dan aset lingkungan terpapar seluas 12.148 ha. Pada kajian risiko bencana tahun 2016 – 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, dari total kejadian bencana di Jawa Timur yaitu 386, sebanyak 98% didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BNPB (2019), Jawa Timur memiliki nilai indeks risiko terhadap ancaman bencana sebesar 152,4 yang tergolong dalam kelas risiko tinggi. Dimana terdapat 22 Kota/Kabupaten yang berada dalam kelas risiko tinggi bencana. Banyuwangi sendiri merupakan kabupaten dengan risiko bencana tertinggi urutan ke-10 dengan nilai indeks risiko bencana 219,2 pada tahun 2015, 208,71 tahun 2016, 206,44 tahun 2017, dan 168,29 tahun 2018 yang dikategorikan pada kelas risiko tinggi. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki indeks risiko bencana banjir tahun 2018 yang tergolong kategori kelas risiko tinggi dengan skor 36 dari skor standar 4 pada kelas risiko rendah (BNPB, 2019). Berikut merupakan tabel tingkat risiko bencana di Kabupaten Banyuwangi

Tabel 1.1 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Ijen	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Letusan Gunung Api Raung	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
10	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 – 2020

Tingkat risiko bencana yang dihasilkan diatas didapatkan dari akumulasi penilaian tingkat bahaya, tingkat kerentanan, serta tingkat kapasitas dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data hasil analisa tahun 2016 dari dokumen Kajian Risiko Bencana Banyuwangi tahun 2017 – 2021, matriks tingkat risiko banjir masih dalam kategori tinggi yang artinya masih dalam nilai skor sama dengan 36 menurut BNPB (2019). Hal ini tentu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan upaya pengurangan

risiko bencana guna meminimalisir dampak kejadian bencana yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Banyuwangi tahun 2017-2021, Banjir merupakan bencana yang sering melanda dan mendominasi di Kabupaten Banyuwangi. Secara topografi sebanyak 20 kecamatan dari total 24 3 kecamatan di Banyuwangi yang berlokasi pada ketinggian 0 – 600 mdpl serta memiliki 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dimana wilayah tersebut dapat mencakup sebagian atau seluruh dari daerah masing – masing kecamatan yang berupa dataran rendah dan berdekatan dengan sungai. Sehingga lokasi tersebut memiliki potensi terhadap bencana banjir apabila ditunjang dengan curah hujan yang tinggi. Potensi penduduk terpapar terhadap bencana banjir di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisa BNPB 2016 sebanyak 1.549.516 jiwa, dimana potensi penduduk terpapar terhadap bencana banjir ini termasuk dalam kelas yang tinggi. Berikut merupakan daftar 35 DAS yang ada di Banyuwangi berdasarkan BPS (2017):

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. DAS Bajulmati | 9. DAS Ketapang | 17. DAS Lungun |
| 2. DAS Sodong | 10. DAS Kali Klatak | 18. DAS Binau |
| 3. DAS Widoro Porong | 11. DAS Sukowidi | 19. DAS Bomo |
| 4. DAS Curah Alas Buluh | 12. DAS K.Banyuwangi | 20. DAS Blambangan |
| 5. DAS Selogiri | 13. DAS BENDO | 21. DAS Komis |
| 6. DAS Sebani | 14. DAS Pakis | 22. DAS Setail |
| 7. DAS Palera | 15. DAS Tambong | 23. DAS Blambangan |

8. DAS Dani	16. DAS Donosuka	24. DAS Kaligung
25. DAS Sarongan	29. DAS Bangorejo	33. DAS Kemut
26. DAS Kandangan	30. DAS Besaran	34. DAS Gambiran
27. DAS Lembu	31. DAS Kedungrejo	35. DAS Bulu Agung
28. DAS Trembelang	32. DAS Karang Bendo	

DAS yang terbesar di Kabupaten Banyuwangi ialah DAS Tambong, DAS Baru, DAS Setail dan DAS Bomo. Menurut penelitian dari Zulis dkk (2018), sumber mata air serta limpasan air permukaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi kebanyakan berasal dari gunung ijen dan gunung raung dengan relief topografi yang tergolong curam dan langsung mengarah ke laut. Kondisi alam seperti inilah yang berisiko terhadap kejadian banjir kiriman yang berasal dari hulu ke hilir. Hal ini dapat terjadi apabila DAS tidak dirawat dengan baik sehingga dapat memudahkan terjadinya erosi lahan akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan tingginya muatan sediman di empat lokasi DAS besar tersebut.

Tabel 1.2 Kejadian Banjir di Banyuwangi Tahun 2014 – 2018

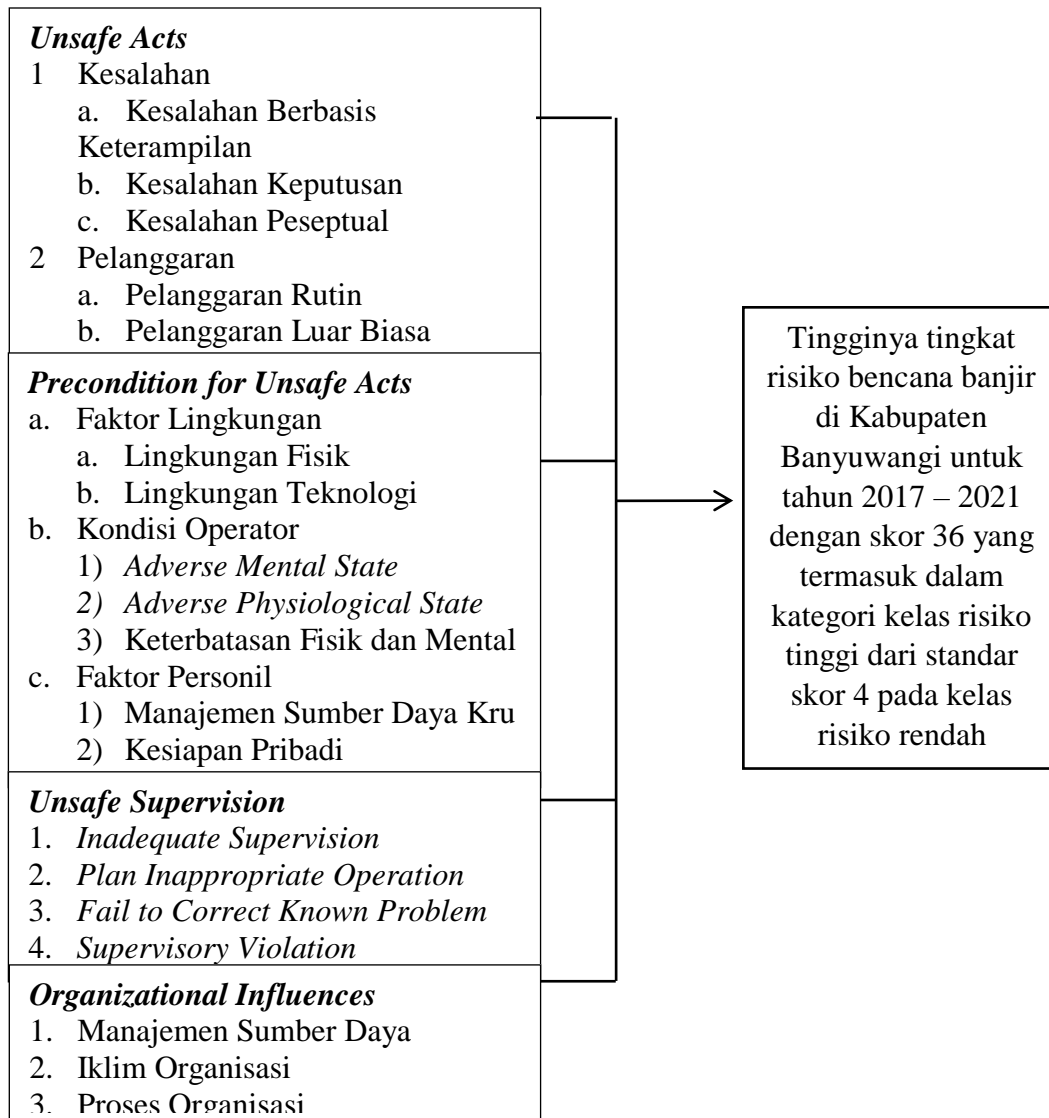
Tahun	Kejadian Banjir
2014	1
2015	2
2016	5
2017	6
2018	9

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) oleh BNPB

Berdasarkan tabel 1.1, kejadian banjir di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara berturut – turut peningkatan tersebut sebesar 100% pada tahun 2015, 150% pada tahun 2016, 20% pada tahun 2017, dan 50% pada tahun 2018. Setelah dikonfirmasi secara langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi memang mengalami trend peningkatan dalam kejadian banjir pada beberapa tahun terakhir. Data bencana banjir yang telah dilaporkan ke BNPB didasarkan pada persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut ialah kejadian banjir dapat dikategorikan menjadi bencana apabila ukuran genangan air berada diatas setengah meter, kejadian banjir yang terjadi berada pada kurun waktu minimal 24 jam, serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain itu banjir di Banyuwangi sendiri dianggap memiliki pola kejadian yang berkala, dimana di beberapa tempat banjir dapat terjadi beberapa tahun sekali dan berulang sesuai dengan polanya. Apabila kejadian banjir dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Bagan di bawah ini merupakan faktor - faktor yang memiliki kemungkinan dapat menyebabkan tingginya tingkat risiko bencana banjir di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2017 – 2021 dengan skor 36 yang termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi dari standar skor 4 pada kelas risiko rendah.



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah Tingginya Risiko Kejadian Banjir di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2017 – 2021 Berdasarkan *Human Factors Analysis and Classification System Model* (Shappell & Wiegmann, 2000)

Berdasarkan bagan identifikasi penyebab masalah pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa tingginya risiko kejadian banjir di Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang digolongkan berdasarkan *Unsafe Acts*,

Precondition for Unsafe Acts, Unsafe Supervision, dan Organizational Influences.

Faktor penyebab yang telah dijelaskan diatas berdasarkan HFACS Model yang dikembangkan oleh Wiegmann dan Shappel (2000). Penjelasan dari setiap faktor – faktor tersebut ialah :

1. *Unsafe Acts*

a. Kesalahan (*Error*)

1) Kesalahan Berbasis Keterampilan (*Skill-based Error*)

Setiap manusia tentu pernah mengalami kesalahan dalam melakukan sesuatu. Bukan tidak mungkin hal ini juga dapat terjadi pada petugas yang berkerja dalam bidang kebencanaan. Salah satu contoh yaitu kelalaian petugas dalam melakukan analisis risiko bencana yang disebabkan oleh keadaan lupa terhadap salah satu langkah penting yang harus dilakukan sehingga akan berdampak pada hasil yang tidak sesuai harapan. Dimana luaran dari adanya analisis risiko ini dapat berupa adanya aktivitas pencegahan dan pengurang risiko bencana di Banyuwangi. Apabila terdapat kesalahan analisa dalam proses tersebut maka implementasi dari program pencegahan tentu kurang optimal serta dapat menimbulkan risiko terjadinya bencana dengan kerugian yang tidak dapat diminalisir.

2) Kesalahan Keputusan (*Decision Error*)

Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi ketika pembangunan infrastuktur pemerintahan maupun swasta yang tidak memperhatikan risiko kemungkinan bencana yang akan terjadi. Seperti halnya daerah perkotaan di

Kabupaten Banyuwangi yang berada di dekat aliran sungai sangat minim sekali adanya tanah resapan. Sehingga ketika curah hujan yang tinggi maka air sungai akan meluap atau volume air hujan akan menggenang di jalanan dalam waktu yang cukup lama dan dapat menimbulkan risiko kejadian banjir.

3) Kesalahan Persepsi (*Perceptual Error*)

Kesalahan persepsi disini dapat terjadi ketika petugas salah memperkirakan cuaca atau iklim yang terjadi akibat adanya informasi yang salah. Sedangkan perubahan iklim sendiri merupakan pemicu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya seperti kesalahan dalam memperkirakan pola hujan, dimana perubahan pola hujan pada DAS akan berdampak pada kejadian banjir (Rochmayanto dkk, 2014).

b. Pelanggaran (*Violation*)

1) Pelanggaran Rutin

Pelanggaran rutin yang masih sering terjadi di masyarakat ialah kebiasaan dalam melakukan buang sampah sembarangan. Di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri masih belum terdapat sanksi yang tegas untuk warga yang melakukan kebiasaan ini. Sehingga sampahpun tidak berada sesuai dengan tempatnya, melainkan di tanah – tanah kosong maupun aliran sungai. Hal inilah yang memicu penyumbatan aliran sungai sehingga risiko banjir cenderung tinggi akibat penumpukan sampah pada beberapa aliran sungai.

2) Pelanggaran Luar Biasa

Aktivitas yang tergolong dalam pelanggaran ini berupa tata guna lahan di sekitar sungai yang digunakan untuk pemukiman warga. Pemukiman yang dibangun secara sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Lahan yang seharusnya dibiarkan kosong disekitar sungai ini justru disalah gunakan oleh warga. Perubahan tata guna lahan yang terjadi di DAS sendiri memiliki pengaruh terhadap debit banjir yang dihasilkan (Halim, 2014). Sehingga dapat meningkatkan risiko banjir di daerah tersebut.

2. *Precondition for Unsafe Acts*

a. Faktor Lingkungan

1) Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik disini memiliki pengaruh yang besar terhadap kejadian bencana banjir. Terdapat parameter dari segi lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap kejadian banjir, diantaranya ialah curah hujan, infiltrasi tanah serta tekstur tanah, serta kemiringan lereng (Wismarini dan Sukur, 2015). Faktor utama yang memiliki hubungan kuat dengan debit banjir ialah curah hujan (Kirana dkk, 2017).

2) Lingkungan Teknologi

Lingkungan jenis ini dapat memberi pengaruh terhadap kondisi maupun kinerja dari seorang pegawai. Lingkungan teknologi mengacu pada faktor – faktor yang mencakup permasalahan desain tempat kerja, peralatan kerja yang digunakan dan lain sebagainya. Dimana menurut Pratiwi (2019) apabila

fasilitas kerja yang digunakan tidak mendukung aktivitas kerja dari pegawai maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan, salah satunya dalam melakukan aktivitas penanggulangan pra-bencana. Sehingga dampak serta resiko dari bencana tidak dapat diminimalisir dengan baik.

b. Kondisi Operator

1) *Adverse Mental State*

Kondisi mental merugikan yang dapat terjadi mengarah pada rendahnya kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Hal ini selaras dengan data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 yang menjelaskan bahwa indeks kesiapsiagaan setiap desa/ kelurahan di Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 0,02, dimana angka ini tergolong dalam level kesiapsiagaan yang rendah. Pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana digunakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kejadian yang tidak diharapkan guna meminimalisir kerugian dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana (Ramli, 2010).

2) *Adverse Physiological State*

Kondisi fisik yang merugikan disini mengarah pada gangguan kesehatan yang dialami seseorang secara fisik seperti kelelahan, sedang memiliki penyakit medis, dan lain sebagainya. Apabila seseorang yang sedang mengalami kondisi sakit dipaksa untuk mengerjakan sesuatu hal maka hasilnya tidak akan optimal. Seperti halnya kondisi ini dapat dialami oleh petugas – petugas yang menangani kasus kebencanaan. Dampak yang dapat ditimbulkan berupa

kinerja yang kurang maksimal sehingga program penanggulangan bencana yang dijalankan kemungkinan tidak sesuai dengan harapan karena SDM yang kurang produktif.

3) Keterbatasan Fisik dan Mental

Keterbatasan fisik dan mental dapat terjadi ketika seseorang dihadapkan dengan situasi, dimana tidak diimbangi dengan kemampuan fisik dalam pikiran maupun kemampuan mental (Shappel & Wiegmann, 2000). Hal ini dapat terjadi ketika petugas tidak terbiasa beroperasi di daerah bencana dengan cuaca ekstrim ataupun pada malam hari. Sebab sistem visual manusia mengalami keterbatasan fungsi pada malam hari serta sistem tubuh manusia yang harus beradaptasi dengan suhu lingkungan yang baru.

c. Faktor Personil

1) Manajemen Sumber Daya Kru

Manajemen sumber daya kru terutama dalam bidang kebencanaan harus menggabungkan pihak – pihak lintas sektoral. Baru – baru ini Kepala BNPB memperkenalkan pendekatan dalam melakukan penanggulangan bencana yaitu pentahelix. Pendekatan ini menitik beratkan pada koordinasi yang kuat dari kelima elemen didalamnya dalam penanggulangan bencana. Elemen tersebut antara lain pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, akademisi dan media. Sistem koordinasi yang baik memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas dari organisasi (Nazarudin, 2016). Sehingga tujuan yang

ingin dicapai dapat terealisasi dengan baik dengan adanya koordinasi antar tim.

2) Kesiapan Pribadi

Dalam hal pengaturan pekerjaan di bidang kebencanaan, individu diharapkan untuk dapat melakukan pekerjaan pada tingkat yang optimal (Shappel & Wiegmann, 2000). Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh kesiapan individu dalam menjalankan tugas. Adanya kegagalan dalam mempersiapkan diri tentu kemungkinan memberikan pengaruh terhadap hasil kinerja dari individu. Sebab kesiapan belajar pada seseorang memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil pembelajaran yang didapatkan (Abdilah, 2015).

3. *Unsafe Supervision*

a. *Inadequate Supervision*

Salah satu peran dari atasan adalah dapat memberikan kesempatan bawahan untuk bisa sukses dalam pencapaian kinerjanya. Tindakan yang dapat dilakukan ialah memberikan arahan atau bimbingan, pelatihan, motivasi kerja serta *role model* yang baik dihadapan pegawai. Melalui adanya pelatihan manajemen bencana, dapat memberikan pemahaman seseorang dalam membentuk sikap yang positif dan baik dalam menghadapi kejadian bencana (Utami & Nanda, 2018). Apabila atasan tidak memenuhi perannya dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan dampak pada SDM yang kurang berkualitas sehingga kinerja yang dihasilkan pun buruk.

b. *Plan Inappropriate Operation*

Perencanaan dibuat sebagai pedoman dalam melakukan segala macam kegiatan. Perencanaan sendiri memiliki pengaruh atau korelasi yang positif dengan efektivitas kerja dari pegawai (Lasut, 2014). Hal ini yang mendorong keharusan adanya perencanaan yang kuat dalam program pencegahan atau mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana dan meminimalisir kerugian yang dihasilkan. Apabila terjadi tindakan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana akibat adanya keadaan darurat, maka akan mengurangi efektivitas kerja yang dihasilkan. Sehingga upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan akan tidak optimal karena tindakan yang tidak sesuai dengan rencana.

c. Fail to Correct Known Problem

Kegagalan dalam mendeteksi atau mengetahui adanya masalah sering terjadi dalam bidang kebencanaan. Seperti halnya kegagalan yang terjadi dalam menentukan daerah rawan bencana, kegagalan dalam memperhitungkan kerugian yang timbul akibat bencana, kegagalan dalam memperkirakan cuaca yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Kegagalan seperti inilah yang dapat memberikan dampak buruk terhadap peningkatan risiko bencana di Kabupaten Banyuwangi. Apabila pihak atasan gagal dalam memecahkan masalah yang terjadi, maka bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah lain yang akan datang.

d. Supervisory Violation

Pelanggaran pengawasan memiliki kaitan dengan pengabaian secara sengaja yang dilakukan oleh atasan ketika melihat pegawainya bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya ada saat dimana pegawai diizinkan untuk

mengelola dokumentasi dan perencanaan dalam penanggulangan bencana. Namun petugas ini bukan berasal dari bidang kebencanaan melainkan dari petugas lain yang tidak memiliki kaitan atau kompetensi yang baik dalam manajemen penanggulangan bencana. Sehingga perencanaan yang dibuat akan memberikan hasil yang tidak sesuai harapan. Kesesuaian kompetensi pegawai memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja yang dihasilkan (Rande, 2016).

4. *Organizational Influences*

a. Manajemen Sumber Daya

Manajemen sumber daya berkaitan dengan pengelolaan aset dari suatu organisasi seperti SDM, keuangan dan peralatan (Shappel & Wiegmann, 2000). Adanya tim khusus dalam menangani kejadian bencana, terdapat alokasi dana untuk penanggulangan bencana serta ketersediaan peralatan atau fasilitas yang lengkap merupakan faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan program penanggulangan bencana. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah tidak dapat optimal apabila terkendala dalam hal ketersediaan sumber daya baik dari jumlah maupun kualitas yang dimiliki oleh manusianya, sebab sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana (Londok, 2014).

b. Iklim Organisasi

Iklim organisasi menggambarkan kondisi yang sedang terjadi lingkungan internal suatu organisasi. Dimana hal ini berasal dari kebiasaan yang dibangun oleh setiap pegawai didalamnya. Iklim organisasi memiliki hubungan yang kuat dan

pengaruh yang besar terhadap kinerja dari pegawai (Tantowi dan Hesti, 2016). Sehingga petugas bidang kebencanaan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar apabila telah nyaman dengan iklim organisasi yang ada. Serta dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas dan perencanaan program penanggulangan bencana yang tepat untuk dapat mengurangi risiko bencana maupun meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

c. Proses Organisasi

Proses organisasi mengacu pada ketersediannya SOP di dalam organisasi sebagai patokan atau standar yang digunakan oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan. Adanya SOP memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai (Agil, 2018). Sehingga semakin baik kepatuhan yang dilakukan oleh petugas penanggulangan bencana terhadap SOP organisasi, maka produktivitas kerja yang dihasilkan akan semakin baik pula.

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan

Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis manajemen sumber daya pada *organizational influence* sebagai faktor pemungkin yang dapat menyebabkan tingginya tingkat risiko kejadian banjir. Faktor – faktor lain yang berpengaruh dalam peningkatan kejadian banjir di Kabupaten Banyuwangi tidak diteliti karena terdapat keterbatasan waktu penelitian dan penyesuaian pada prioritas penelitian yang akan dilakukan.

1.3.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana gambaran manajemen sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan mitigasi bencana terhadap risiko kejadian banjir ?
2. Bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana bidang kesehatan terhadap risiko kejadian banjir yang dilakukan oleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mitigasi bencana bidang kesehatan pada kejadian banjir di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi gambaran manajemen sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan mitigasi bencana terhadap risiko kesehatan akibat kejadian banjir.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan mitigasi bencana terhadap risiko kesehatan akibat kejadian banjir yang dilakukan oleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan serta pengalaman baru terkait penerapan ilmu yang sudah di dapat selama berada di

bangku perkuliahan mengenai pelaksanaan mitigasi bencana bidang kesehatan pada risiko kejadian banjir yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi institusi pendidikan berupa pengembangan dalam pembelajaran maupun sistem pendidikan yang memiliki kaitan dengan mitigasi bencana bidang kesehatan pada risiko kejadian banjir yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam manajemen sistem penanggulangan bencana

1.5.3 Bagi Dinas Kesehatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan dalam sistem manajemen penanggulangan prabencana bidang kesehatan serta perencanaan program mitigasi sebagai dasar pengurangan risiko dampak kesehatan yang diakibatkan oleh peningkatan kejadian banjir.